

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
SAMARINDA**

# **LAPORAN KEUANGAN**

UAPPA, DIPA 005.01  
PERIODE 31 DESEMBER 2024





**LAPORAN KEUANGAN**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Bung Tomo, No. 136, Samarinda Seberang**

**Telp. 0541-260659 Fax. 0541-262062**

**Samarinda - Kalimantan Timur 75132**

**e-mail : [ptun.samarinda@gmail.com](mailto:ptun.samarinda@gmail.com)**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, 27 Februari 2025

Sekretaris,



Epi Randabunga Runggu, S.E.  
NIP 19790204 200502 2 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52



## Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo, No. 136, Samarinda Seberang Samarinda - Kalimantan Timur 75132  
Telp. 0541-260659 Fax. 0541-262062 e-mail : [ptun.samarinda@gmail.com](mailto:ptun.samarinda@gmail.com)

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 27 Februari 2025

Sekretaris,

  

Epi Randabunga Rungngu, S.E.

NIP 19790204 200502 2 001

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9.119.000,- dari estimasi pendapatan sebesar Rp11.048.000,- pada TA 2024.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp5.113.782.801,- atau mencapai 97,74 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.252.567.000,-.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp23.965.145.984,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.048.100,- ; dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp23.963.097.884,-;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp318.855,- dan Rp23.964.827.129,-.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.119.000,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.494.228.331,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(5.485.109.331,-). Tidak terdapat Defisit Kegiatan Non Operasional dan Tidak terdapat Defisit Pos-pos Luar Biasa sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(5.485.109.331,-).

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp24.326.378.945,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(5.485.109.331,-) terdapat Nilai Koreksi

Rp1.106.286,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.124.663.801,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp23.964.827.129,-.

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	11.048.000	9.119.000	0,00	11.169.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>11.048.000</b>	<b>9.119.000</b>	<b>0,00</b>	<b>11.169.000</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	3.543.093.000	3.489.211.508	98,48	3.882.788.609
Belanja Barang	B.4	1.709.474.000	1.644.571.293	96,20	1.616.385.470
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	114.150.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>5.252.567.000</b>	<b>5.133.782.801</b>	<b>97,74</b>	<b>5.613.324.079</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	2.048.100	1.196.075
Jumlah Aset Lancar		2.048.100	1.196.075
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	16.798.993.000	16.798.993.000
Peralatan dan Mesin	C.15	4.180.573.831	4.180.573.831
Gedung dan Bangunan	C.16	8.144.028.867	8.111.132.582
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	5.717.078	5.717.078
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(5.166.214.892)	(4.753.122.147)
Jumlah Aset Tetap		23.963.097.884	24.343.294.344
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	98.890.000	98.890.000
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(98.890.000)	(98.890.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>23.965.145.984</b>	<b>24.344.490.419</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	318.855	18.111.474
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		318.855	18.111.474
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>318.855</b>	<b>18.111.474</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	23.964.827.129	24.326.378.945
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>23.964.827.129</b>	<b>24.326.378.945</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>23.965.145.984</b>	<b>24.344.490.419</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	9.119.000	11.169.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>9.119.000</b>	<b>11.169.000</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	3.489.211.508	3.882.788.609
Beban Persediaan	D.3	58.379.950	58.529.550
Beban Barang dan Jasa	D.4	951.645.121	986.139.786
Beban Pemeliharaan	D.5	520.215.577	490.344.839
Beban Perjalanan Dinas	D.6	62.789.716	82.169.025
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	411.986.459	437.845.984
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>5.494.228.331</b>	<b>5.937.817.793</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(5.485.109.331)</b>	<b>(5.926.648.793)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(5.485.109.331)</b>	<b>(5.926.648.793)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(5.485.109.331)</b>	<b>(5.926.648.793)</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	24.326.378.945	24.607.036.421
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.485.109.331)	(5.926.648.793)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(1.106.286)	26.467.488
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.5	(1.106.286)	26.467.488
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.6	-	-
JUMLAH		<b>(1.106.286)</b>	26.467.488
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	5.124.663.801	5.619.523.829
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>23.964.827.129</b>	<b>24.326.378.945</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

*Dasar Hukum*  
*Entitas dan*  
*Rencana*  
*Strategis*

Tahun 2024 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2024 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tahun 2015 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda TH 2015 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara;
2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara;
3. Peningkatan Kualitas SDM;
4. Peningkatan Kualitas Pelaporan;
5. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice);

6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI;
8. Program Peningkatan Manajemen Peadilan Militer dan TUN.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah

sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## *Aset Tetap*

### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah 3 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang terjadi adalah revisi perubahan halaman 3 DIPA, dan belanja minus pegawai. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	11.048.000	11.048.000
Pendapatan Lain-lain	0	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>11.048.000</b>	<b>11.048.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	4.493.093.000	3.543.093.000
Belanja Barang	1.659.474.000	1.709.474.000
Belanja Modal	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.152.567.000</b>	<b>5.252.567.000</b>

*Realisasi Pendapatan*  
Rp9.119.000,-

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.119.000,- atau 82,54 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp11.048.000. Pendapatan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	11.048.000	9.119.000	82,54
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>11.048.000</b>	<b>9.119.000</b>	<b>82,54</b>

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami penurunan 18,35 persen dibandingkan TA 2023. Pendapatan yang diperoleh berasal dari Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Penurunan pendapatan terjadi karena Tidak semua Rumah Dinas Hakim berpenghuni.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	9.119.000	11.169.000	-18,35
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	0,00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.119.000</b>	<b>11.169.000</b>	<b>-18,35</b>

**B.2 Belanja**

*Realisasi Belanja Negara Rp5.133.782.801,-*

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp5.133.782.801,- atau 97,74 persen dari anggaran belanja sebesar Rp5.252.567.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024*

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.543.093.000	3.489.211.508	98,48
Belanja Barang	1.709.474.000	1.644.571.293	96,20
Belanja Modal	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>5.252.567.000</b>	<b>5.133.782.801</b>	<b>97,74</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.252.567.000</b>	<b>5.133.782.801</b>	<b>97,74</b>

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 8,84 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya Belanja Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dikarenakan adanya mutasi keluar pegawai yang lebih besar dibandingkan jumlah mutasi masuk.
2. Menurunnya Pagu Anggaran Belanja Barang yang dikelola pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
3. Tidak terdapat alokasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.489.211.508	3.882.788.609	(10,14)
Belanja Barang	1.644.571.293	1.616.385.470	1,74
Belanja Modal	-	114.150.000	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>5.133.782.801</b>	<b>5.613.324.079</b>	<b>(8,54)</b>

### **B.3 Belanja Pegawai**

*Belanja Pegawai*  
*Rp3.489.211.508,-*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.489.211.508,- dan Rp3.882.788.609,-.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 10,14 persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan karena adanya Mutai Pegawai. dikarenakan adanya mutasi keluar pegawai yang lebih besar dibandingkan mutasi masuk pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.489.211.508	3.882.788.609	(10,14)
Belanja Lembur	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.489.211.508</b>	<b>3.882.788.609</b>	<b>(10,14)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.489.211.508</b>	<b>3.882.788.609</b>	<b>(10,14)</b>

*Belanja Barang*

*Rp1.644.571.293,-*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.644.571.293,- dan Rp1.616.385.470,-. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami peningkatan 1,74 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan karena meningkatnya Belanja Barang Operasional dan Belanja Pemeliharaan.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	958.111.842	948.745.907	0,99
Belanja Barang Non Operasional	0	11.290.000	-
Belanja Jasa	11.325.898	26.674.524	(57,54)
Belanja Pemeliharaan	553.111.862	490.344.839	12,80
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	63.089.716	82.169.025	(23,22)
Belanja Barang Persediaan	59.231.975	57.161.175	3,62
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.644.871.293</b>	<b>1.616.385.470</b>	<b>1,76</b>
Pengembalian Belanja	300.000	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.644.571.293</b>	<b>1.616.385.470</b>	<b>1,74</b>

*Tidak terdapat Belanja Modal*

**B.5 Belanja Modal**

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan Belanja Modal pada TA 2023 sebesar Rp114.150.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan TA 2023 hal ini disebabkan karena pada TA 2024 satker Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak mendapatkan alokasi Belanja Modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	114.150.000	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>114.150.000</b>	<b>-100,00</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>114.150.000</b>	<b>-100,00</b>

*Tidak terdapat Belanja Modal Tanah*

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

*Tidak terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin*

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan pada TA 2023 sebesar Rp114.150.000,-. Belanja Modal Peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 Hal ini disebabkan oleh Tidak adanya alokasi Belanja Modal pada TA 2024 yang dikelola Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023
Printer	0	5.000.000
Laptop	0	0
PC	0	0
Lemari penyimpan disabilitas	0	0
lemari kecil	0	0
meja layanan disabilitas	0	0
sofa ruang tunggu disabilitas	0	0
tongkat tuna netra	0	0
kursi roda	0	0
ranjang pasien	0	0
Lemari Arsip	0	109.150.000
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>114.150.000</b>
Pengembalian	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>114.150.000</b>

*Tidak terdapat Belanja  
Penambahan Nilai  
Peralatan dan Mesin*

**B.5.3 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin**

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin TA 2024 sedangkan pada TA 2023.

*Tidak terdapat Belanja  
Modal Gedung dan  
Bangunan*

**B.5.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023.

*Tidak terdapat Belanja  
Modal Penambahan  
Nilai Gedung dan  
Bangunan*

**B.5.5 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan**

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023.

*Tidak terdapat Belanja  
Modal Penambahan  
Nilai Jaringan*

**B.5.6 Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan**

Tidak terdapat Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan pada TA 2024 dan pada TA 2023.

*Tidak terdapat Belanja* **B.5.7 Belanja Bantuan Sosial**

*Bantuan Sosial*

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Tidak Terdapat Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Pada TA 2024 Bendahara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengelola Uang Persediaan sebesar Rp50.000.000,- yang terbagi menjadi 2 yaitu UP Tunai sebesar Rp30.000.000,- dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar Rp20.000.000,-. UP Tunai telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2024 dengan NTPN nomor 6000B45KQ6NDJK3S sebesar Rp9.388.387,-.

Pada Bulan Desember TA 2024 Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meminta TUP sebesar Rp14.607.000,- yang digunakan untuk pembayaran uang makan bulan Desember 2024. Terdapat sisa TUP dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2024 dengan NTPN Nomor ACF466QT9MEIQJIU sebesar Rp586.000,-.

*Tidak Terdapat Kas di  
Bendahara  
Penerimaan*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Tidak Terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan pada 31 Desember TA 2023.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tidak Terdapat Piutang PNBP*

### **C.4 Piutang PNBP**

Tidak terdapat Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Tidak Terdapat Bagian Lancar Tagihan TP/TGR*

### **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tidak Terdapat Bagian Lancar TPA*

### **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tidak Terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang*

### **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

*Lancar*

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

### **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

*Tidak terdapat Belanja  
Dibayar di Muka*

Tidak terdapat Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Tidak terdapat  
Pendapatan yang  
Masih Harus Diterima*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Pendapatan yang Masih harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan  
Rp2.048.100,-*

### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.048.100,- dan Rp1.196.075,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023*

Jenis	TH 2024	TH 2023
Barang Konsumsi	2.048.100	1.196.075
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.048.100</b>	<b>1.196.075</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Dengan berita acara stok opname fisik persediaan nomor : W6-TUN3/1412/PL.07/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.

*Tidak Terdapat  
Tagihan TP/TGR*

**C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Tidak terdapat Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tidak Terdapat  
Tagihan Penjualan  
Angsuran*

**C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Tidak terdapat Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Tidak terdapat Nilai  
Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih – Piutang  
Jangka Panjang

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah  
Rp16.798.993.000,-

### C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.798.993.000,-.

Tidak terdapat Mutasi nilai tanah dari TA 2023 dan 2024:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>16.798.993.000</b>
Mutasi tambah:	
Selisih Revaluasi Aset	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>16.798.993.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Tanah TA 2024

No.	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	KIB	Nilai
1.	3000 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	1	11.750.550.00
2.	700 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	1	1.888.933.00
3.	400 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	2	1.078.250.00
4.	800 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	2	2.081.260.00
Jumlah				16.798.993.00

Keseluruhan tanah berada di Jl. Bung Tomo Samarinda Seberang kelurahan Baqa, dimana peruntukan tanah seluas 3000 m2 digunakan untuk gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sedangkan yang lainnya digunakan untuk tempat tinggal atau rumah dinas. Tanah – tanah tersebut telah bersertifikat atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MAHKAMAH AGUNG RI pada tanggal 29 Oktober 2014, sebelumnya keseluruhan sertifikat nama an Kementrian/Lembaga (Kementrian Kehakiman).

### C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin  
Rp4.180.573.831,-*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.180.573.831,-. Tidak terdapat mutasi nilai tambah dan kurang pada TA 2024.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>4.180.573.831</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0
Hibah Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>4.180.573.831</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-3.738.405.260
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>442.168.571</b>

### C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp8.144.028.867,-*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.144.028.867,- dan Rp8.111.132.582,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>8.111.132.582</b>
Mutasi tambah:	
koreksi pencatatan ke Gedung dan Bangunan	32.896.285
Mutasi kurang:	
Penilaian Revaluasi Aset Gedung dan Bangunan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>8.144.028.867</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-1.427.809.632
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>6.716.219.235</b>

Terdapat koreksi tambah nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp32.896.285,- yang berasal dari Nilai Koreksi Gedung dan Bangunan. Koreksi dilaksanakan Berdasarkan temuan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan berdasarkan surat tugas nomor: 958/BP/ST.PW1.1.1/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024. Surat Koreksi Pencatatan BMN dari Kuasa Pengguna Barang Nomor 1237A/SEK.PTUN-W6.TUN3/PL.07/XI/2024 Tanggal 30 November 2024.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Tidak terdapat  
Jalan, Jaringan dan  
Irigasi*

#### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Tidak terdapat Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan terdapat saldo per 31 Desember 2023.

*Aset Tetap Lainnya  
Rp5.717.078,-*

#### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sama sebesar Rp5.717.078,-.

Aset Tetap Lainnya tersebut berupa buku lainnya. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>5.717.078</b>
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>5.717.078</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>5.717.078</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Tidak terdapat  
Konstruksi Dalam  
Pengerjaan*

#### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Tidak terdapat Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

*Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp5.166.214.892,-*

#### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp5.166.214.892,- dan Rp4.753.122.147,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian dan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan asitas manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
TA 2024*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.180.573.831	3.738.405.260	442.168.571
2	Gedung dan Bangunan	8.144.028.867	1.427.809.632	6.716.219.235
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>12.324.602.698</b>	<b>5.166.214.892</b>	<b>7.158.387.806</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud  
Rp98.890.000,-*

### C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp98.890.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berupa *software Komputer (SIAD PTUN)* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>98.890.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>98.890.000</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(98.890.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>-</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud TA 2024*

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer	98.890.000
<b>Jumlah</b>	<b>98.890.000</b>

*Tidak Terdapat Aset Lain-Lain*

**C.22 Aset Lain-Lain**

Tidak terdapat Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp98.890.000,-*

**C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp98.890.000,- dan tidak terdapat Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada 31 Desember 2023. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software Komputer	98.890.000	98.890.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>98.890.000</b>	<b>98.890.000</b>	<b>0</b>
Aset Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>98.890.000</b>	<b>98.890.000</b>	<b>0</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Tidak terdapat Saldo*

*Uang Muka dari KPPN*

#### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Tidak terdapat saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pada TA 2024 Bendahara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengelola Uang Persediaan sebesar Rp50.000.000,- yang terbagi menjadi 2 yaitu UP Tunai sebesar Rp30.000.000,- dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar Rp20.000.000,-. UP Tunai telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2024 dengan NTPN nomor 6000B45KQ6NDJK3S sebesar Rp9.388.387,-.

Pada Bulan Desember TA 2024 Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meminta TUP sebesar Rp14.607.000,- yang digunakan untuk pembayaran uang makan bulan Desember 2024. Terdapat sisa TUP dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2024 dengan NTPN Nomor ACF466QT9MEIQJIU sebesar Rp586.000,-.

*Utang kepada Pihak*

*Ketiga*

*Rp318.855,-*

#### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp318.855,- dan Rp18.111.474,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

### Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Beban Langganan Telepon	34.357	Tagihan Telepon Desember 2024
Beban Langganan Air	129.498	Tagihan Air Desember 2024
Beban Langganan Koran	155.000	Tagihan Koran Desember 2024
<b>Total</b>	<b>318.855</b>	

*Tidak terdapat Saldo  
Pendapatan Diterima  
di Muka*

#### C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Tidak terdapat Beban  
yang Masih Harus  
Dibayar*

#### C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak terdapat Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Beban yang Masih Harus Di Bayar merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

#### *Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2024 dan TA 2023*

Uraian	TH 2024	TH 2023
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Ekuitas*

*Rp23.964.827.129,-*

## **C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23.964.827.129,- dan Rp24.326.378.945,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNPB*  
*Rp9.119.000,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.119.000,- dan Rp11.169.000,.  
Pendapatan tersebut terdiri dari:

#### *Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9.119.000	11.169.000	(18)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>9.119.000</b>	<b>11.169.000</b>	<b>(18)</b>

Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2024 adalah Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa pendapatan yang diperoleh dari sewa rumah dinas Ketua, Wakil Ketua dan Hakim.

### D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai*  
*Rp3.489.211.508,-*

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.489.211.508,- dan Rp3.882.788.609,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 1.190.036.140	Rp 1.219.014.480	- 2,38
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 16.145	Rp 17.740	- 8,99
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 68.773.750	Rp 71.368.610	- 3,64
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 20.563.084	Rp 22.484.890	- 8,55
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 40.320.000	Rp 40.320.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 1.586.685.000	Rp 1.881.370.000	- 15,66
Beban Tunj. PPh PNS	Rp 238.403.249	Rp 242.380.289	- 1,64
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 51.925.140	Rp 60.108.600	- 13,61
Beban Uang Makan PNS	Rp 179.389.000	Rp 195.199.000	- 8,10
Beban Tunj. Umum PNS	Rp 10.500.000	Rp 12.825.000	- 18,13
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	Rp 102.600.000	Rp 137.700.000	- 25,49
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.489.211.508</b>	<b>Rp 3.882.788.609</b>	<b>-10,14</b>

### D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan*  
*Rp58.379.950,-*

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp58.379.950,- dan Rp58.529.550,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	58.379.950	58.529.550	-0,26
<b>Jumlah</b>	<b>58.379.950</b>	<b>58.529.550</b>	<b>-0,26</b>

*Beban Barang dan Jasa*  
*Rp951.645.121,-*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp951.645.121,- dan Rp986.139.786,- . Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>TH 2024</b>	<b>TH 2023</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Beban Barang Operasional	935.267.543	948.029.045	(1,35)
Beban Langganan Daya dan Jasa	8.182.548	6.570.711	24,53
Beban sewa	2.745.030	20.025.030	(86,29)
Beban Non Operasional Lainnya	0	5.200.000	100,00
Beban Barang Operasional Lainnya	5.450.000	225.000	2322,22
Beban Peralatan dan Mesin	0	6.090.000	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>951.645.121</b>	<b>986.139.786</b>	<b>(3,50)</b>

*Beban Pemeliharaan*  
*Rp520.215.577,-*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp520.215.577,- dan Rp490.344.839,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan Beban Pemeliharaan terjadi karena banyaknya peralatan dan mesin yang dimiliki telah mencapai batas masa manfaat sehingga memerlukan pemeliharaan yang lebih intensif dan adanya kenaikan harga pasar pada pemeliharaan peralatan dan mesin.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	273.628.940	259.521.037	5,44
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170.689.063	164.943.930	3,48
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan COVID-19	0	0	0,00
Beban Persediaan untuk pemeliharaan	0	0	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	75.897.574	65.879.872	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>520.215.577</b>	<b>490.344.839</b>	<b>6,09</b>

*Beban Perjalanan Dinas*  
*Rp62.789.716,-*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp62.789.716,- dan Rp82.169.025,- . Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	61.487.216	82.018.525	-25,03
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	267.500	150.500	77,74
Beban Perjalanan Paket meeting dalam kota	1.035.000	0	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>62.789.716</b>	<b>82.169.025</b>	<b>-23,58</b>

*Tidak terdapat Beban  
Barang untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Tidak terdapat Beban  
Bantuan Sosial*

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp411.986.459,-*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp411.986.459,- dan Rp437.845.984,-.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2024 dan 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	218.769.318	245.458.190	-10,87
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	193.190.141	192.387.794	0,42
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	0,00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>411.959.459</b>	<b>437.845.984</b>	<b>-5,91</b>
Beban Amortisasi Software	-	-	0,00
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>411.959.459</b>	<b>437.845.984</b>	<b>(5,91)</b>

*Tidak terdapat Beban  
Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Tidak terdapat Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023.

*Tidak terdapat Surplus  
dari Kegiatan Non  
Operasional*

#### **D.12 Kegiatan Non Operasional**

Tidak terdapat nilai pada Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 Pos Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah kegiatan yang terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Tidak terdapat Pos Luar  
Biasa

**D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Nilai untuk Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### *Ekuitas Awal*

*Rp24.607.036.421,-*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24.607.036.421,- dan Rp24.918.956.568,-.

### *Defisit LO*

*Rp(5.926.648.793,-)*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(5.926.648.793,-) dan Rp(6.407.717.720,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### *Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi*

### **E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Tidak terdapat Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

### *Tidak terdapat*

### *Penyesuaian Nilai Aset*

### **E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Tidak terdapat Saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk 31 Desember 2023. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

### *Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan*

### **E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023.

### *Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap*

### **E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak Terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.,- sedangkan

pada 31 Desember 2023 terdapat selisih reval sebesar Rp408.499.000,- .

*Koreksi Aset Tetap Non  
Revaluasi  
Rp26.467.488,-*

#### **E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp26.467.488,-, sedangkan pada 31 Desember 2023 tidak terdapat koreksi Aset Tetap Non Revaluasi. Koreksi ini adalah transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terdapat koreksi kurang nilai Jaringan menjadi tambah nilai gedung dan Bangunan, hal ini terjadi karena ada kesalahan pencatatan tegangan Listrik diatas 20 KVA. Koreksi dilakukan Berdasarkan Surat Koreksi Pencatatan BMN dari Kuasa Pengguna Barang Nomor W6.TUN3/1391/PL.07/II/2024 tanggal 29 Desember 2024. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Jaringan	-194.407.206
Gedung dan Bangunan	220.874.694
<b>Jumlah</b>	<b>26.467.488</b>

*Tidak terdapat Koreksi  
Lain-Lain*

#### **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Tidak terdapat Nilai Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pada 31 Desember 2023.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar Entitas*  
*Rp5.619.523.829,-*

## **E.5 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.619.523.829,- dan Rp6.095.797.573,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

### *Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas TA 2024`*

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Nilai</b>
Diterima dari Entitas Lain	(11.169.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.613.324.079
Transfer Masuk	17.368.750
<b>Jumlah</b>	<b>5.619.523.829</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

### **E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Diterima dari Entitas lain (DDEL) merupakan realisasi Penerimaan Negara yang telah disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi Pengembalian Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024. Saldo Diterima dari Entitas lain (DDEL) Pada periode hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp11.169.000,- .

Ditagihkan ke Entitas lain (DKEL) merupakan realisasi Belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi Pengembalian Belanja sampai dengan 31 Desember 2024. Saldo Ditagihkan ke Entitas lain (DKEL) Pada periode hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp5.613.324.079,-.

### E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan asset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp17.368.750,-. Nilai Transfer Masuk sebesar Rp17.368.750,- sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Rincian Transfer Masuk terdiri dari:

#### *Rincian Transfer Masuk TA 2024*

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Peralatan dan Mesin	Badan Urusan Administrasi MA	17.368.750
<b>Jumlah</b>		<b>17.368.750</b>

Transfer Masuk yang didapat adalah Mesin Scanner (Peralatan Personal Komputer), dengan BAST Nomor: 891/BUA.7/BAST/BMN-SS/12/2023 tanggal 16 Desember 2023.

Tidak terdapat transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

*Ekuitas Akhir*

*Rp24.326.378.945,-*

### E.6 Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp24.326.378.945,- dan Rp24.607.036.421,-.

Ekuitas Akhir merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset dikurangi nilai kewajiban.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak terdapat kejadian – kejadian penting setelah tanggal Neraca.

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

#### **F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut BPK**

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK

#### **F.2.2 Rekening Pemerintah**

Sehubungan dengan tahapan Restrukturisasi Rekening Pemerintah sesuai PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, maka semua rekening pemerintah yang dikelola Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menampung dana APBN telah di restrukturisasi dari Rekening Giro menjadi Virtual Account. Adapun data rekening yang dikelola pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah:

1. Rekening Virtual 653245598571000 atas nama *BPG 046 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Persetujuan Pembukaan S-2732/WPB.12/KP.06/2023 tanggal 16 Oktober 2023. Digunakan untuk menampung Anggaran DIPA 005.01.
2. Rekening Virtual 651555598581000 atas nama *BPG 046 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Persetujuan Pembukaan S-1829/WPB.12/KP.06/2023 tanggal 08 Juli 2023. Digunakan untuk menampung Anggaran DIPA 005.05.
3. Rekening Giro atas nama *RPL 046 PTUN Samarinda utk Biaya Perkara*, Nomor Rekening 2069-01-000153-30-2, digunakan untuk menampung Dana Titipan Pihak ke tiga. Rekening telah mendapatkan persetujuan dari BUN Pusat Nomor S-2783/MK.5/2015 tanggal 27 April 2015.

### F.2.3 Revisi DIPA

Selama Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melakukan 5 kali revisi DIPA, dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi Pertama adalah revisi perubahan halaman III DIPA dan tidak merubah Pagu Anggaran, revisi dilakukan berdasarkan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W6-TUN3/516/KU.01/IV/2024 Tanggal 12 April 2024 dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Timur dengan Nomor S-636/WPB.20/2024 Tanggal 14 April 2024. Digital Stamp tetap DS:2116-1044-0448-7064.
2. Revisi Kedua adalah revisi perubahan halaman III DIPA dan tidak merubah Pagu Anggaran, revisi dilakukan berdasarkan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W6-TUN3/785/KU.01/VII/2024 Tanggal 12 Juli 2024 dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Timur dengan Nomor S-1067/WPB.20/2024 Tanggal 13 Juli 2024. Digital stamp tetap DS:2116-1044-0448-7064.
3. Revisi Ketiga adalah revisi DIPA Otomatis berupa tambahan Pagu Anggaran (Belanja Modal) sebesar Rp110.000.000,-. Revisi dilakukan berdasarkan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Agung Nomor 1534/SEK/RA.1.8/VIII/2024 Tanggal 24 Agustus 2024 dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran dengan Nomor S-407/AG/AG.5/2024 Tanggal 1 September 2024. Pagu Anggaran semula Rp6.134.752.000,- menjadi Rp6.244.752.000,-. Digital stam semula DS:2116-1044-0448-7064 menjadi DS:0611-7614-5237-5309.
4. Revisi Keempat adalah revisi DIPA Otomatis berupa Pengurangan Pagu Belanja Pegawai untuk penyelesaian Pagu Minus Pegawai di bawah Mahkamah Agung RI. Revisi dilakukan berdasarkan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2793/SEK/RA.1.6/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-356/PB.2/2024 tanggal 23 Oktober 2024. Pagu Anggaran semula Rp6.244.752.000,- menjadi Rp5.711.003.000,-. Digital stam semula DS:0611-7614-5237-

5309 menjadi DS:2045-2015-8891-7583.

5. Revisi Kelima adalah revisi DIPA untuk menyesuaikan anggaran Belanja Barang dan Belanja Pegawai. Revisi dilakukan berdasarkan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W6-TUN3/1324/RA1.8/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-2000/WPB.20/2024 tanggal 14 Desember 2024. Revisi tidak merubah Pagu DIPA sebesar Rp5.711.003.000 dan Digital stam yaitu DS:2045-2015-8891-7583.

#### **F.2.4 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

Pada periode TA 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak terdapat ralat SPM, SSBP dan SSPB.

#### **F.2.5 Catatan Penting Lainnya**

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 55/PA/SK/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Pejabat Pengelola Keuangan (DIPA) sesuai dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: W6-TUN3/28/KU.01/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, PPABP, Staff Pengelola Keuangan. SK Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: W2-TUN5/26/KU.01/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W2.TUN5/57/KU.01/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pengelola Sakpa/SAI.

Adapun Nama-nama dalam SK tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Nama
<b>Pengadilan Tata</b>	Kuasa Pengguna Anggaran	Epi Randabunga Rungngu, S.E.
	Pejabat Pembuat Komitmen	Rahmat Hidayat, S.T.
<b>Usaha Negara Samarinda</b>	Pejabat Penanda Tangan /Penguji SPM	Epi Randabunga Rungngu, S.E
	Bendahara Pengeluaran	Muji Rahayu Mustikaningtiyas
	Bendahara Penerima	Tuparni, SH
	Operator SAI (SAIBA)	Mardiana
	Operator SAI (SIMAK)	Rindana P.A Hutabarat, S.H

**KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,**  
**Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
			Per 31-12-2022	Tahun 2023	Per 31-12-2023	Per 31-12-2023
<b>A</b>	<b>Tanah</b>					
1	Tanah	16.798.993.000	-	-	-	16.798.993.000
	<b>Jumlah</b>	<b>16.798.993.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.798.993.000</b>
<b>B</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>					
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.150.449.441	688.170.866	102.728.572	790.899.438	359.550.003
2	Alat Angkut Darat Tak Bermotor	2.553.000	638.250	1.276.500	1.914.750	638.250
3	Alat Kantor	586.433.525	461.055.325	16.050.400	477.105.725	109.327.800
4	Alat Rumah Tangga	1.211.857.395	1.142.943.445	24.745.100	1.167.688.545	44.168.850
5	Alat Komunikasi	10.400.000	7.859.000	726.000	8.585.000	1.815.000
6	Komputer Unit	835.322.300	679.230.775	65.434.275	744.665.050	90.657.250
7	Peralatan Komputer	285.599.690	240.802.617	22.712.073	263.514.690	22.085.000
8	Alat Khusus Kepolisian	1.296.480	162.060	324.120	486.180	810.300
9	Peralatan Pemancar	21.950.000	21.950.000	-	21.950.000	-
10	Alat Studio	74.712.000	28.954.400	13.942.400	42.896.800	31.815.200
	<b>Jumlah</b>	<b>4.180.573.831</b>	<b>3.271.766.738</b>	<b>247.939.440</b>	<b>3.519.706.178</b>	<b>660.867.653</b>
<b>C</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>					
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.471.027.582	751.320.906	142.943.768	894.264.674	5.576.762.908
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.319.970.000	249.035.674	44.995.784	294.031.458	1.025.938.542
3	Tugu/Tanda Batas	320.135.000	38.329.339	6.790.498	45.119.837	275.015.163
	<b>Jumlah</b>	<b>8.111.132.582</b>	<b>1.038.685.919</b>	<b>194.730.050</b>	<b>1.233.415.969</b>	<b>6.877.716.613</b>
<b>D</b>	<b>JARINGAN</b>					
1	JARINGAN LISTRIK	0	28.809.744	(28.809.744)	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>28.809.744</b>	<b>-28.809.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>					
1	Bahan Perpustakaan Cetak	5.717.078	-	-	-	5.717.078
	<b>Jumlah</b>	<b>5.717.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.717.078</b>
	<b>Total</b>	<b>29.096.416.491</b>	<b>4.339.262.401</b>	<b>413.859.746</b>	<b>4.753.122.147</b>	<b>24.343.294.344</b>

\*Beban Amortisasi

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA  
 DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA  
 PER 31 DESEMBER 2023

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	-	-	-	-	-	-	-
2							
3							
<b>Jumlah</b>				Rp -	Rp -	Rp -	-